

BAB III

BERBAGAI DIPLOMASI INDONESIA DI IMF

Bab ini membahas mengenai diplomasi Indonesia juga membahas prestasi dan gaya Sri Mulyani melobby ini dan segudang penghargaan yang diarah merupakan wujud keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bahan pertimbangan IMF dan Word Bank dengan Indonesia terpilih menjadi DC Chair spring meeting 2017.

A. Diplomasi Indonesia

1. Strategi Kebijakan Diplomasi Ekonomi Politik Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia perlu dilakukan transformasi dalam misi penguatan kinerja ekonomi nasional dalam menghadapi perkembangan rezim investasi dan perdagangan internasional yang semakin terbuka dan kompetitif, kondisi perubahan substansi dalam praktik hubungan internasional menuntut redefinisi teori-teori diplomasi. Jika dulu terkait perang dingin (politik), saat ini tema diplomasi berbeda karena adanya perkembangan ke arah ekonomi yang disebut sebagai *multi-track diplomacy*, jika dalam bentuk praktiknya dulu yang dikirim adalah militer, sekarang adalah perusahaan-perusahaan asing (MNC's), jika dulu dalam keadaan fisik, sekarang dalam bentuk pemikiran dan ekonomi.

Adanya perkembangan teknologi komunikasi juga telah merekonstruksi bentuk diplomasi, serta

merubah bentuk pembagian jaringan global yang meliputi sektor jasa, perdagangan dan investasi. Perdagangan abad 21 saat ini memiliki karakter yang kompleks, terfragmentasi, namun sekaligus terintegrasi. Bentuk komprehensif integrasi perdagangan dimulai pada tahun 1995, pasca perjanjian Uruguay dan juga pasca perjanjian Doha-Qatar, mekanisme perdagangan menuntut inovasi dan kemajuan produksi dan pengelolaan SDA untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan efekburuk ekonomi (kerusakan lingkungan, krisis ekonomi dan kemiskinan) yang tidak bisa terjadi secara natural, melainkan melalui kebijakan perdagangan nasional; yang salah satunya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi produk dan investasi di sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah perdagangan.

Ekonomi global telah berevolusi dengan menjadi lebih interdependensi dan fokus kepada *TRIPS plus*, *reward standard* dan *competition policy*. Yang tujuan normatifnya adalah berdikari secara ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dan dalam nawacita Indonesia juga berharap mampu mendorong keterlibatan dunia di pentas global. Yang jika dalam bentuk aksinya akan berupa penekanan komprehensif di bidang perdagangan, UKM, maritim, kerjasama regional-multilateral, serta evaluasi ulang perdagangan bebas untuk lebih pro kepada kepentingan Indonesia dan peningkatan hak kekayaan intelektual Indonesia dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Agar dapat memenuhi komitmen tersebut, Indonesia seharusnya mencipakan kebijakan yang jelas terkait perdagangan, baik pada level regional,

multilateral dan global. Yang berkomitmen pada ekonomi kerakyatan (*people centred economy*) yang ditujukan kepada hajat hidup rakyat banyak, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.¹

2. Realitas dan Tantangan Diplomasi Ekonomi Politik Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia yang telah lama memasuki rezim perdagangan internasional dan era globalisasi, ditandai dengan berbagai mekanisme kebijakan nasional dan perjanjian internasional untuk menjamin berjalannya proses perdagangan antar negara. Namun dibuatnya aturan yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia malah tidak berjalan sesuai harapan. Antara lain bentuk mekanisme yang kontra-produktif adalah diterapkannya aturan perlindungan investasi asing (*bilateral investmen treaties*/BIT), yang harapannya bisa meningkatkan jumlah investasi asing ke Indonesia. Dan BIT ini berkembang menjadi lebih luas ke dalam mekanisme perdagangan bebas (FTA) dan aturan HAKI (hak kekayaan intelektual) yang masuk di dalam aturan WTO.

Dampak buruk dari kebijakan yang pro asing tersebut, antara lain menyebabkan semakin lemahnya kedaulatan nasional Indonesia, posisi setara antara pelaku ekonomi nasional dan asing menyebabkan negara tidak lagi bisa melindungi pebisnis Indonesia,

¹Haryanto, A. (2004). *Diplomasi Indonesia (Realitas dan Prospek)*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

semakin meningkatnya dominasi negara maju, perlakuan yang setara padahal kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga menyebabkan kondisi tidak adil, negara penerima investasi asing tidak bisa menerapkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kebebasan penarikan investasi asing tanpa kontrol (mempermudah *capital flight*) dan investor asing dapat mengajukan tuntutan kepada negara yang menerima investasi mereka. Dan fakta empiris menunjukkan bahwa penerapan aturan BIT yang diharapkan mampu memberikan perlindungan investasi asing, malah Keberadaan BIT tidak mendorong investasi dan Brazil tidak punya BIT, tapi investasinya lebih tinggi daripada Indonesia (jadi BIT tidak memiliki korelasi dengan peningkatan investasi), misal AS dan Jepang melakukan investasi di Indonesia tanpa BIT dan investasi mereka tetap tinggi, malahan dalam kasus Jepang ketika ada BIT angka investasinya malah turun. Selain itu, aturan BIT menghilangkan adanya “*Policy Space*” pemerintah Indonesia, sehingga dalam kasus tertentu Indonesia tidak bisa memberikan kebijakan yang tegas kepada pelaku investasi asing yang malah memberikan dampak buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia.

Dan posisi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara-negara *mega traders* (pelaku perdagangan besar) sangatlah lemah, *mega traders* sendiri adalah pelaku ekonomi yang dianggap memenuhi 2 hal: 1. Rasio antara sumbangan ekspor terhadap GDP sebuah negara/peran dalam perdagangan Global, 2. Kontribusi Ekspor dalam GDP (Nasional) untuk saat ini *the real mega traders* adalah Tiongkok karena memiliki 11% *sharing* dari perdagangan global dan Tiongkok memiliki

pertumbuhan perdagangan paling kuat, di saat AS dan Uni Eropa mengalami krisis ekonomi.

B. Keberhasilan Lobby Indonesia

1. Pendekatan Pemerintah melalui Sri Mulyani di Spring Meetings

Pemerintah kembali melobi Standart & Poor's (S&P) Rating Services untuk menaikkan kredit rating Indonesia ke *investment grade*. Pendekatan kali ini dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetary Fund di Washington DC, Amerika Serikat 4-9 Oktober lalu. Pertemuan Rutin Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, atau Spring Meetings IMF-World Bank 2017 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi-lobi, guna memuluskan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang akan digelar di Bali tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah memanfaatkan *kesempatan* dijadikannya Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan akbar tersebut untuk promosi investasi di Indonesia yang tidak bisa dipungkiri memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi dunia. Tamu-tamu ini akan melihat sendiri bahwa ekonomi Indonesia dan masyarakat Indonesia yang maju dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang akan kami sampaikan. Dilansir, pertemuan yang diadakan pada akhir pekan lalu itu

benar-benar dimanfaatkan Sri untuk melakukan konsolidasi dengan para petinggi lembaga keuangan dunia. Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani terlihat berbincang dengan akrab dengan para bos lembaga keuangan dunia. Sebagai informasi, Indonesia secara resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun depan.

Para pemimpin politik dan pejabat dari seluruh dunia membentuk karya IMF melalui berbagai forum dan badan mereka. Dengan IMF *merupakan* pusat respon global terkoordinasi terhadap berbagai peristiwa di pasar keuangan internasional dan ekonomi dunia, memahami apa yang kelompok ini lakukan dan bagaimana cara kerjanya penting. IMF Comitte menyarankan dan melapor kepada Dewan Gubernur IMF mengenai pengawasan pengelolaan sistem moneter dan keuangan internasional, termasuk tanggapan terhadap kejadian yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu sistem. Ini juga mempertimbangkan usulan oleh Dewan Eksekutif untuk mengubah Anggaran Dasar dan menyarankan hal-hal lain yang dapat diacu oleh Dewan Gubernur. Meskipun IMFComitte tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan formal, dalam praktiknya, meskipun IMFComitte telah menjadi instrumen kunci untuk memberikan arahan strategis terhadap pekerjaan dan kebijakan IMF. IMFComitte biasanya bertemu dua kali setahun, pada Pertemuan Tahunan dan Musim Semi Bank-Fund. Untuk setiap pertemuan, Managing Director menyiapkan draf agenda yang akan dibahas oleh Dewan Eksekutif, yang disetujui oleh Ketua IMFComitte, dan diadopsi secara formal oleh IMFComitte pada pertemuan tersebut. Pada akhir pertemuan, Komite mengeluarkan sebuah komunike yang merangkum pandangannya. Komunike ini

memberikan panduan untuk program kerja IMF selama setengah tahun menjelang Pertemuan Musim Semi atau Tahunan berikutnya.

Ukuran dan komposisi IMFComite mencerminkan Dewan Eksekutif. IMFComite *memiliki* 24 anggota yang merupakan gubernur bank sentral, menteri, atau orang lain yang memiliki peringkat sebanding dan biasanya berasal dari gubernur 189 negara anggota IMF. Setiap negara anggota yang menunjuk Direktur Eksekutif dan setiap kelompok negara anggota yang memilih Direktur Eksekutif menunjuk anggota IMFComite. IMFComite beroperasi berdasarkan konsensus, termasuk pemilihan ketuanya. Meskipun tidak ada peraturan formal mengenai batas waktu, sejak 2007 ketua IMFComite telah ditunjuk untuk jangka waktu tiga tahun. Sejumlah lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, berpartisipasi sebagai pengamat dalam pertemuan IMFComite.

Komite Gabungan Bersama Dewan Gubernur Bank dan Dana Transfer Sumber Daya Manusia ke Negara-negara Berkembang, yang lebih dikenal sebagai Komite Pembangunan, didirikan pada bulan Oktober 1974 untuk memberi nasehat kepada Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia mengenai masalah-masalah kritis. Isu pembangunan dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Komite biasanya bertemu dua kali setahun setelah pertemuan IMFComite. Komite Pembangunan memiliki 25 anggota (biasanya menteri keuangan atau pembangunan) yang bersama-sama mewakili keanggotaan penuh IMF dan Bank Dunia. Ketua sekarang adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri

Kuayaan RI. Keanggotaan Komite Pembangunan Ketua (Indonesia).

Bank Dunia/Komite Pembangunan IMF hari ini mengumumkan bahwa yang Terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah terpilih sebagai Ketua baru Bank Dunia/Komite Pembangunan IMF. Dia menggantikan Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan Indonesia, efektif pada tanggal 16 Agustus 2016. Menteri Indrawati memiliki catatan layanan dan prestasi yang sangat baik di tanah airnya dan di panggung global. Sebelum bergabung kembali dengan Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan, dalam peran sebelumnya Ibu Indrawati menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer di Bank Dunia dari tahun 2005 sampai 2010, di mana dia bertanggung jawab untuk operasi di seluruh dunia. Dia bekerja sama dengan negara-negara klien dan negara-negara anggota untuk menempatkan strategi operasional yang sesuai untuk mengatasi tantangan pembangunan baru dan gigih dalam mendukung tujuan Bank Dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama. Dia juga bertanggung jawab untuk arah dan kebijakan kerangka kerja strategis dari Dana Bank untuk yang Termiskin, salah satu sumber bantuan terbesar bantuan 77 negara termiskin di dunia. Dia juga memimpin Dewan Penasehat Kelompok Bank Dunia tentang Gender dan Pembangunan, yang menyatukan para pemimpin global dan ahli tentang isu-isu gender, termasuk dari sektor swasta.

Komite Pembangunan dengan 25 anggota – sebagian besar adalah menteri-menteri Keuangan atau Pembangunan - mewakili keanggotaan 189 negara Bank Dunia dan IMF. Mandat Komite adalah untuk

menyarankan Dewan Gubernur Bank dan Dana pada isu-isu pembangunan yang sangat penting.²

2. Latar Belakang Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemerintah yang mempunyai peran penting untuk menjalankan dan mengatur ekonomi di negaranya tersebut. Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia yang menaruh keadilan, kemanusiaan, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang termasuk memakai sistem ekonomi campuran. Setelah terjadinya peristiwa krisis moneter yang terjadi pada saat pemerintahan Soeharto membuat ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang drastis, seperti turunnya harga rupiah dan peningkatan inflasi yang semakin tinggi. Pergantian pemerintahan pun dilakukan agar dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi. Selama beberapa dekade pergantian pemerintahan sampai saat ini, ekonomi di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan dan perbaikan yang cukup baik, sedikit demi sedikit Indonesia dapat meninggalkan krisis ekonomi tersebut. Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN sudah masuk dalam jajaran 20 kekuatan ekonomi dunia yang

²agusta. (2013, januari 22). *International monetary fund IMF*. Retrieved november 5, 2017, from Wordpress.com: <http://au9usta.wordpress..com>

tergabung dalam forum G-20 bersama dengan beberapa negara-negara di Dunia. Banyak para investor luar negeri menanamkan investasinya pada pasar modal di Indonesia. Untuk pengembangan ekspor, Indonesia tidak hanya mengembangkannya dalam negara ASEAN saja tetapi sudah merambah sampai Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Dan Sektor perbankan Indonesia terus menunjukkan peningkatan hingga dijuluki sebagai yang terbaik dibandingkan negara-negara tetangga.

Diperkirakan oleh para ahli ekonomi bahwa kedepannya perekonomian Indonesia terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi yang baru di Dunia setelah negara China dan India. Secara umum, Indonesia sudah menerapkan perekonomian yang sesuai dan mengikuti alur yang benar dengan dibarengi penanganan yang tepat dari pemerintah namun permasalahan yang masih belum lepas dari negara kita adalah KKN, persoalan-persoalan politik atau non ekonomi dan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Beberapa masalah ini merupakan faktor yang menjadi penghambat kita untuk maju, tapi di lain sisi kita harus tetap optimis bahwa negara Indonesia dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dan cepat menanggalkannya, kita harus tetap bangga terhadap Indonesia.³

3. Sri Mulyani dimata Internasional

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati terpilih menjadi Ketua Komite Pembangunan

³Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (Edisi Ketiga).

Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro (mantan menteri keuangan) dan telah efektif mulai 16 Agustus 2016. Dilansir dari situs resmi bank dunia, Sri Mulyani dinilai mempunyai catatan layanan dan prestasi yang sangat baik di Tanah Air maupun panggung global. Sebelum bergabung kembali dengan Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan, dalam peran sebelumnya Sri Mulyani menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer di Bank Dunia dari tahun 2005 sampai 2010, di mana dia bertanggung jawab untuk operasi di seluruh dunia. Dia bekerja sama dengan negara-negara klien dan negara-negara anggota untuk menempatkan strategi operasional yang sesuai untuk mengatasi tantangan pembangunan baru dan gigih dalam mendukung tujuan Bank Dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama.

Sri Mulyani juga bertanggung jawab untuk arah dan kebijakan kerangka kerja strategis dari Dana Bank untuk yang Termiskin, salah satu sumber bantuan terbesar bantuan 77 negara termiskin di dunia. Dia juga memimpin Dewan Penasehat Kelompok Bank Dunia tentang Gender dan Pembangunan, yang menyatukan para pemimpin global dan ahli tentang isu-isu gender, termasuk dari sektor swasta.

Presiden World Bank Jim Yong Kim memberikan sanjungan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia memaparkan, Sri Mulyani diberi kepercayaan mengelola dana miliaran dolar AS. Hal ini tak lepas dari hasil kerja yang selalu baik dari Sri Mulyani. Beliau bukan saja sumber daya bagi Indonesia, tapi beliau juga merupakan sumber inspirasi bagi semua orang. Dengan memiliki menteri keuangan seperti Sri Mulyani, Indonesia mendapatkan banyak

keuntungan. Beliau sudah lihat banyak hal di Bank dunia, praktik yang baik dan kurang baik di dunia, dan bagaimana negara berusaha meningkatkan martabatnya dalam hal pembangunan, menjelaskan mengenai suatu perubahan yang dibawa di Bank Dunia adalah bahwa Sri Mulyani ingin memastikan jika ada inovasi di manapun negara berada dan itu akan menjadi teladan ke seluruh negara lainnya. Mantan Direktur Bank Dunia ini juga mendapatkan penghargaan dari USINDO. Penghargaan itu diberikan atas aktivitasnya yang berhubungan dengan kebijakan publik dan kepedulian mengenai masalah kemiskinan dan pembangunan di seluruh dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia atau *Best Minister in the World Award* dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Predikat Menteri Terbaik adalah penghargaan global tahunan yang dianugerahkan kepada satu orang menteri dari seluruh negara di dunia. Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, disebutkan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau mengatakan, penghargaan ini didedikasikan untuk 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras menjaga serta mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan.Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menerima penghargaan sebagai Best Minister in the World Award di Dubai.Pihak penyelenggara menjelaskan, acara *World Government Summit* merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, melibatkan pimpinan pemerintahan seluruh dunia dalam suatu forum dialog global.⁴

Topik yang diangkat dalam forum ini antara lain proses pemerintahan dan kebijakan publik, yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan teknologi, inovasi, dan topik lainnya.Acara yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta ini bertujuan menjadikan forum sebagai ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar dan pimpinan sektor swasta.Hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan bahan untuk melihat tren masa depan sekaligus implikasinya bagi masalahkemanusiaan.Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, *World Government Summit* dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama.

⁴Indonesia, j. (2017). sri mulyani raih penghargaan . *menteri terbaik dunia di world government summit*, 4.

Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.⁵

4. Gaya Lobby Sri Mulyani

Beliau menuturkan bertemu dengan banyak menteri keuangan, seperti menteri keuangan Kanada, menteri keuangan AS yang baru saja terpilih untuk membicarakan kerja sama di bidang financial action tax force. Sri Mulyani berbicara soal perpajakan, di mana pemerintah Indonesia selesai melakukan tax amnesty dan mereformasi perpajakan sementara pemerintah AS sekarang sedang memulai reformasi perpajakan. Beliau juga bertemu dengan menteri keuangan Jepang untuk membahas bilateral antara Jepang dengan Indonesia yang berhubungan kerja sama ekonomi. Bertukar pikiran dengan menteri keuangan India untuk menciptakan perbaikan dan melindungi kelompok miskin. Lalu, bertemu dengan menteri keuangan Korea Selatan yang membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korsel, dan juga bertemu dengan menteri keuangan Swiss yang berdiskusi mengenaikondisi ekonomi di eropa dan bagaimana kebijakan ekonomi di Swiss yang diakui oleh dunia.⁶

⁵6, l. (2016, april 23). *jadwal sri mulyani*. Retrieved november 5, 2017, from pertemuan world bank imf: <http://bisnis.liputan6.com>

⁶org, w. b. (2016). press release. *minister of finance Indonesia Sri Mulyani Indrawati becomes development committe chair*, 1-5.

5. Komite Pembangunan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memimpin Development Committee Chair (DC Chair) dalam rangkaian IMF-World Bank Group Annual Meetings 2017 di Washington DC. Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, dalam acara Spring Meeting IMF-World Bank 2017 juga dirinya datang sebagai pimpinan *development community* yang merupakan suatu komite yang menghimpun seluruh menteri-menteri pembangunan yang menjadi gubernur dari bank dunia.

Tujuannya adalah untuk membahas kondisi dan tantangan pembangunan pada saat ini, terutama dikaitkan dengan komitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals, bagaimana menghilangkan kemiskinan di dunia, dan bagaimana menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Kita membahas berbagai reformasi yang dibutuhkan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga peranan bank dunia untuk membantu terutama negara-negara miskin di Afrika, negara-negara yang mengalami konflik dan negara yang harus menghadapi kondisi pengungsi yang sangat membutuhkan dukungan dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi pembangunan.

Lalu, Sri Mulyani dengan timnya juga menghadiri salah satu komite di IMF yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara. Pada acara ini, dibahas mengenai kondisi ekonomi terkini. Pada pertemuan ini ditemukan hal positif, yaitu ekonomi pada 2017-2018 diperkirakan

tumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ditahun sebelumnya.

DC juga bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Gubernur World Bank dan IMF mengenai isu-isu penting dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Namun selanjutnya, tantangan perekonomian pada 2017-2018 juga cukup besar, tantangan tersebut berasal dari proteksionisme maupun geopolitik, maupun kondisi yang tidak pasti dari arah kebijakan negara-negaramaju yang terkait dengan pemilu di Eropa. Oleh karena itu dari pertemuan tersebut di bahas berbagai hal yang menyangkut bagaimana negara-negara harus melakukan kebijakan ekonomi untuk menjaga dirinya dari pengaruh global ekonomi yang tidak pasti dan bagaimana kerjasama dan koordinasi bisa dilakukan agar ekonomi dunia menjadi sehat dan demikian ekonomi dari masing-masing negara semakin sehat dan baik dan diberikan kesempatan, kemampuan untuk mempresentasikan kawasan ASEAN yang selama ini menjadi kawasan yang paling aktif dan potensial di dalam perekonomian dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia dalam acara Spring Meetings 2017 yang diadakan langsung di Washington D.C, Amerika Serikat (AS). Dia menerangkan dalam pertemuan itu dibahas mengenai bagaimana ketahanan emerging market dalam menghadapi ekonomi dunia. Di sini dibahas terutama kecenderungan menghadapi proteksionisme dan anti globalisasi yang terjadi di

negara-negara barat. Lebih lanjut dia menjabarkan, banyak pemikiran yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, mengenai bagaimana negara emerging market mempersiapkan diri dalam hadapai kenaikan suku bunga The Fed atau Bank Sentral AS. Ia juga melakukan kegiatan untuk bertemu dengan menkeumenkeu yang penting dalam sisi partner terhadap Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan dan bantuan Bank Dunia dan IMF menjadi bagian yang sangat penting untuk mebantuu kerugian ekonomi dan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam, kelaparan, korban konflik dan pengungsi di negara perang.

DC juga membahas issue penting mengenai masalah pendidikan (Learning and Education-bagaimana meningkatkan Kualitas hasil pendidikan dan proses belajar di berbagai negara) ini penting bagi Indonesia yang sudah mengeluarkan anggaran 400 triliun untuk pendidikan agar mencapai hasil generasi muda yang lebih berkualitas dan baik dan bisa berkompetisi dengan negara-negara. Ia menambahkan, Bank Dunia akan meningkatkan dukungan kepada pemberdayaan manusia (Human capital) dengan mendorong pendekatan sistematis terhadap kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan sosial yang menciptakan fondasi untuk pembangunan jangka panjang.

Dalam kesempatan ini, Indonesia dapat menyumbangkan pengalaman dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan infrastruktur dan menjaga daya tahan ekonomi dari pengaruh negatif gejolak global dengan membangun fondasi ekonomi untuk dapat berdiri tangguh, bergerak maju bersama dan berkelanjutan. Selain itu, pertemuan bilateral bersama

menteri keuangan negara lain di dunia juga akan diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Spring Meeting 2017 ini. Pertemuan bilateral tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kesetaraan kebijakan pertukaran informasi antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk mengatasi upaya penghindaran pajak. Kemudian, dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Keuangan RI akan mendorong agar Indonesia menjadi anggota The Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan organisasi yang memberantas aksi pencucian uang (*money laundering*).

Dalam pertemuan tersebut, isu perdagangan internasional dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perekonomian global termasuk perekonomian AS. Salah satu bahasan yang terkait isu ini adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara. Sayangnya, Indonesia harus kecewa. Pasalnya, kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati. Hal ini memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia, artinya negara kuat mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendiri, bukan atas kepentingan bersama. Ke depan, perumusan kebijakan ekonomi mengantisipasi risiko tersebut. Ia akan menggunakan kesempatan Spring Meeting untuk meningkatkan kerja sama kita dalam Automatic Exchange of Information, karena ini salah satu poin penting G-20 dalam mengimplementasikan AEOI. Sri Mulyani juga mengajak beberapa pejabat Kementerian Keuangan

untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai perekonomian dunia.⁷

⁷government, k. (2017, april 13). *menkeu pimpin komite pembangunan*. Retrieved november 5, 2017, from menkeu pimpin komite pembangunan: <http://www.kemenkeu.go.id>